

KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM MENGELOLA OBJEK WISATA PULAU PUNTEN DI DESA MINANGA TIGA KECAMATAN PUSOMAEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Retno Pinoke¹
Ronny Gosal²
Daud Liando³

Abstrak

Pulau Punten merupakan salah satu pulau yang terletak di desa Minanga Tiga, yang dapat di tempuh sekitar 10 menit dengan perahu. Hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau ditambah keindahan bawah laut semakin mempertegas keindahan pulau ini banyak wisatawan yang mengunjungi objek wisatapulau punten dimana para wisatawan menikmati pantai dengan keindahan pasirnya, akses pandang terhadap terbit dan terbenamnya matahari, laut dengan aneka kekayaan terumbu karang yang begitu mempesona, serta kegiatan lainnya namun belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, pondok wisata, tempat makan dan lain sebagainya yang dibutuhkan sehingga kenyamanan yang tidak dirasakan oleh para wisatawan. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana kinerja dinas pariwisata dalam mengelola objek wisata pulau punten di desa minanga tiga kecamatan pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang belum optimal karena dalam pengelolaan pembangunan objek wisata pulau punten masih dalam tahap perencanaan disamping itu juga sumber dana yang terbatas sehingga sarana dan prasarana tidak tersedia.

Kata kunci: Kinerja, Pariwisata, Objek Wisata.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting, bahwa sektor pariwisata diharapkan akan dapat menjadi penghasil nomor satu. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan dikeluarkan Undang - undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai dasar penyelenggaraan kepariwisataan, pada pasal 30 wewenang pemerintah daerah yaitu untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan daya tarik wisata, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan lintas sektor dalam rangka penyediaan transportasi, sarana prasarana umum dan lain sebagainya.

Sulawesi utara merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki keanekaragaman budaya dan keindahan alam, salah satunya Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyajikan keindahan alam dan mengundang para wisatawan untuk berkunjung menyaksikan keindahan alamnya. Beberapa objek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan seperti pantai Lakban berada di Kecamatan Ratatotok, Aer Konde di Ratahan, pantai Hais di Kecamatan Belang, Taman Laut Tumbak serta Bentenan Beach Resort (BBR) di Kecamatan Pusomaen. Minahasa Tenggara juga memiliki keunikan seni dan budaya daerah, seperti Musik Kolintang, Musik Bambu, Tari Maengket, Tari Maramba. Dalam rangka melestarikan

seni budaya daerah dan mengembangkannya sebagai daya tarik wisata, maka pemerintah membuat paket - paket wisata ataupun pergelaran-pergelaran seni budaya, seperti Festival Lakban, Festival Bentenan, Pemilihan Putra-Putri Minahasa Tenggara, Festival Musik Bambu, Sail Teluk Tomini, dll. Pelestarian seni budaya dan pengembangannya dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Beberapa potensi alam dan objek wisata atau daya tarik wisata yang ada dikecamatan Pusomaen diantaranya adalah Pantai Lumintang, Pantai Bentenan, Taman Laut Tumbak serta Pulau Punten. Pulau Punten merupakan salah satu pulau yang terletak di desa Minanga Tiga, yang dapat di tempuh sekitar 10 menit dengan perahu. Hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau ditambah keindahan bawah laut disekeliling pulau semakin mempertegas keindahan pulau ini, serta lautnya yang jernih sangat cocok untuk melakukan kegiatan snorkeling yang menjadi pilihan para wisatawan dan kegiatan wisata lainnya. Selain itu, dari objek wisata pulau punten juga dapat dinikmati indahnya akses pandang terhadap terbit dan terbenamnya matahari.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah harus menciptakan masyarakat yang mandiri seperti yang dicita - citakan bersama, disisi lain pemerintah daerah dituntut harus mampu mengelola dan mengembangkan seluruh potensi pariwisata dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, kelestarian

sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Sejalan dengan pembangunan pariwisata yang berupaya untuk menjamin agar dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata, salah satu pendekatan alternative adalah desa untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Dengan demikian, desa harus kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah. Fenomena ini sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya menurut prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah setempat sampai ke tingkat kesatuan pemerintahan terkecil yaitu desa.

Pengembangan desa dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pariwisata, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha pengembangan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat didalamnya pemberdayaan diperlukan sebuah kebijakan yang tepat agar peningkatan ekonomi masyarakat merata dan peran pemerintah dalam mewujudkan program lebih efisien dan efektif. Kebijakan pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk proses untuk menemukan perencanaan dan implementasinya yang sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai pelaku

pariwisata dengan mengembangkan konsep-konsep pariwisata berbasis masyarakat dengan pemberdayaan maka diharapkan masyarakat yang berada atau tinggal disekitar objek-objek wisata mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, pada prinsipnya tidak lepas dari peran para pelaku usaha dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang terlibat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepariwisataan yang ada di wilayah destinasi itu sendiri. Pelaku pariwisata yang dimaksud adalah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kebudayaan dan pariwisata harus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Desa minanga tiga memiliki potensi pariwisata yaitu pulau punten yang memiliki ciri khas tersendiri, disamping itu juga nelayan merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa minanga tiga, oleh karena itu hasil tangkapan ikan bisa dikelola untuk menjadikan usaha masyarakat desa yaitu membuat abon (makanan yang berbahan dasar ikan) yang bisa dijadikan sebagai cenderamata.

Sementara itu, banyak wisatawan yang mengunjungi objek wisata pulau punten dimana para wisatawan menikmati pantai dengan keindahan pasirnya, akses pandang terhadap terbit dan terbenamnya matahari, laut dengan aneka kekayaan terumbu karang yang begitu mempesona, serta kegiatan lainnya namun belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, pondok wisata, tempat makan dan lain sebagainya yang dibutuhkan sehingga

kenyamanan yang tidak dirasakan oleh para wisatawan. Kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan pengunjung dengan menyediakan fasilitas seperti akomodasi, transportasi, restoran, pondok wisata, pusat informasi dan lain sebagainya yang belum sepenuhnya mendukung dalam memwadahi kegiatan bagi para wisatawan yang datang.

Dalam proses pengelolaan diatas maka diharapkan pemerintah daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah merespon akan kebutuhan dari masyarakat yang mengunjungi objek wisata pulau punten. Untuk mentaktisi hal diatas, sesuai Peraturan Bupati No 03 Tahun 2011 bahwa tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu melaksanakan kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata serta fungsinya yaitu menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelayanan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya peningkatan daerah.

Untuk itu pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten untuk meningkatkan kinerja untuk mengelola dan mengembangkan potensi – potensi yang ada di desa Minanga Tiga Kecamatan Pusomaen salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan sector pariwisata, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan Negara.

Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja di definisikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Namun demikian, dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja yaitu “performance”. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan – tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Menurut Muhamad Mahsun (2006:25) bahwa kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Rivai dan Basri (2005:50) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Selanjutnya Armstrong dan Baron (dalam Wibowo 2007:2) Kinerja (Performance) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Widodo (2006:78), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2007:176) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Sedangkan menurut Baban Sobandi (2006:176), kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu baik yang terkait dengan input, output, outcome, maupun impact. Sementara itu menurut Sadu Wasistiono (dalam Harabani Pasolong 2013:130) mengemukakan bahwa kinerja organisasi pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Indikator Produktivitas yaitu hubungan antara tingkat pencapaian hasil implementasi dari wewenang dan tugas dari organisasi pemerintah atas sumber dana yang tersedia
2. Indikator Kualitas Layanan yaitu kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi pemerintah.
3. Indikator Responsivitas yaitu sejauhmana kepekaan organisasi pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Indikator Responsibilitas yaitu apakah pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah itu dilakukan dengan prinsip prinsip organisasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit maupun eksplisit.

Istilah kepariwisataan berasal dari kata wisata. Dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan : Konstruksi pengertian tentang wisata di berikan batasan sebagai: Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sedangkan seseorang atau sekelompok orang yang dengan melakukan kegiatan perjalanan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian tentang wisata tadi, disebut sebagai wisatawan. Keseluruhan fenomena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian wisata dan wisatawan diatas diberikan batasan pengertian atau didefinisikan dengan istilah pariwisata.

Pariwisata (tourism) atau kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah Daerah, dan pengusaha (UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata). Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Definisi pariwisata (tourism) memiliki ruang lingkup kegiatan yang luas, setidaknya meliputi lima jenis kegiatan meliputi wisata bahari

(beach and sun tourism), wisata pedesaan (rural and agro tourism), wisata alam (natural tourism), wisata budaya (cultural tourism), atau perjalanan bisnis (business tour). Posisi ekowisata (ecotourism) memang agak unik berpijak pada tiga kaki sekaligus yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya.

Berbagai kisi-kisi pemahaman mengenai destinasi pariwisata seperti halnya diadaptasi dari banyak batasan pengertian, pada intinya mengandung tujuan yang sama bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut :

- a. Obyek dan daya tarik wisata (Attractions) yang mencakup daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus.
- b. Aksesibilitas (Accessibility), yang mencakup dukungan system transportasi, yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi yang lain.
- c. Amenitas (Amenities), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi : akomodasi, rumah makan, toko cenderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.
- d. Fasilitas pendukung (Ancillary Services), yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dan sebagainya.
- e. Kelembagaan (Institutions), yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam

mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dan partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiono, 2005:1).

Yang menjadi fokus penelitian adalah menganalisis kinerja dinas pariwisata dalam mengelola objek wisata Pulau Puntén di desa Minanga Tiga dilihat dari beberapa indikator yaitu: Indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas dan Responsibilitas.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-unsur masyarakat yang ada secara purposive artinya sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini :

- a. Kepala Dinas Pariwisata

- b. Kepala sub bagian objek dan daya tarik wisata
- c. Masyarakat

Hasil Penelitian

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan ukuran atas hasil kinerja organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjuk secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator jumlah bangunan cagar budaya (BCB) dalam kondisi terlindungi sehingga mencapai target dengan capaian 100%. Bangunan yang akan diusulkan dimana tidak semua masyarakat pemilik yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB, sehingga perlu upaya-upaya yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu upaya-upaya intensifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan tersebut. Kendala lainnya bahwa keberadaan bangunan yang teridentifikasi sebagai bangunan cagar budaya saat ini telah berubah secara fisik, sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi situs dan bangunan cagar budaya.

Indikator Jumlah sanggar seni dan budaya yang aktif telah mencapai target dengan capaian 110%. Keberhasilan capaian target kinerja ini adalah telah diadakan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan budaya melalui pendataan seni dan budaya setiap tahun, monitoring dan legalitas seni yang semuanya dilakukan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni dan budaya tradisional yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Indikator Jumlah sarana rekreasi dan hiburan tidak mencapai target dengan capaian 85%. Capaian target kinerja ini adalah telah diadakan update data setiap tahun sarana rekreasi dan hiburan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Kendala yang lain karena banyaknya objek wisata yang masih dimiliki oleh masyarakat sehingga dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum dapat mengembangkan daerah - daerah tersebut.

Indikator Jumlah objek wisata yang memenuhi standar tidak mencapai target dengan capaian 90%. Capaian target kinerja ini adalah telah diadakan pendataan objek-objek wisata secara rutin setiap tahun, monitoring objek wisata baru yang perlu dikembangkan sehingga mampu menarik wisatawan yang datang ke Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ketidakberhasilan pencapaian target disebabkan oleh masih banyak kawasan yang dapat dijadikan objek wisata tapi tidak didukung dengan fasilitas penunjang, faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan objek wisata sekitar yang tidak mau menghibahkan sebagian tanah untuk Pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak dapat membangun sarana dan prasarana penunjang objek wisata.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai target dengan capaian 98%. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kab.Minahasa Tenggara, upaya lain yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten.Minahasa Tenggara yaitu :

- Melaksanakan kerja sama pariwisata dengan Kabupaten/Kota lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
- Melakukan pameran di dalam dan luar daerah untuk mempromosikan unggulan potensi pariwisata yang ada di Kab.Minahasa Tenggara
- Meningkatkan jalinan kerja sama dengan instansi terkait dalam penataan infrastruktur untuk mendukung daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adapun hasil analisis pada pencapaian setiap indikator pengukuran

kinerja yang sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Total anggaran belanja tidak langsung yang di kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017 Rp. 2.429.182.869 (Dua Miliard Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran belanja tidak langsung ini di gunakan untuk belanja pegawai yang terdiri atas : 1. Gaji dan Tunjangan dan 2. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kinerja.

Total anggaran belanja langsung yang di kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 5.162.831.500 (Lima Miliard Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Anggaran belanja langsung di manfaatkan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dari total anggaran sebagaimana tersebut di atas, tingkat penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2017 adalah sebesar 86,44 % (lihat lampiran 2).

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,

visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017 menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik, , meskipun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan yang dirasakan masih menghambat pencapaian target kinerja tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, kelemahan dalam aspek perencanaan dan keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia.

Kesimpulan

1. Sumber dana untuk pengelolaan dan pengembangan pulau punten dapat disimpulkan belum optimal, karena anggaran yang diperlukan masih sangat kurang, sehingga menghambat pengelolaan dan pengembangan pulau punten.
2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah disimpulkan cukup baik karena para pegawai melakukan pelayanan yang cukup baik ketika masyarakat menghimpun informasi di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara.
3. Kepekaan organisasi pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau pengunjung (wisatawan) disimpulkan belum optimal karena sarana dan prasarana belum tersedia dalam mendukung kegiatan wisatawan.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan di dinas kebudayaan dan pariwisata disimpulkan cukup baik karena semua pegawai saling berkoordinasi

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.

Saran

1. Diharapkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dalam mengupayakan sumber dana melalui APBD.
2. Diharapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar lebih peka lagi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan pengunjung.
3. Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, maka Pemerintah Daerah disarankan agar berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial, seperti objek-objek wisata baru yang belum optimal di kelola.
4. Diharapkan agar tetap mempertahankan kebersamaan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amins, A. 2009. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah . Yogyakarta : Penerbit Laksbang PRESSindo.
- Burhan, B. 2005. Metode Penelitian Sosial. Format Kuantitatif dan Kualitaif. Surabaya : Airlangga University.
- Bambang, S. 2012. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Konsep dan Aplikasi di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Gomes, F. C. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offset.
- Harbani, P. 2007. Teori Administrasi Publik. Makassar : Alfabeta.

- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.
- Pasolong, H. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Putu, I G dan Surya, I K. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Silalahi, U. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soekadijo, R. 2000. Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai System Linkage. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sutopo, H. B. 2006. Metode Kualitatif. Surakarta : Penerbit UNS press.
- Suyanto., Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Kencana.
- Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.